

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan/Instansi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kemaritiman dan investasi. Kemenko Marves pertama kali didirikan pada tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo, seiring dengan visi pemerintahannya yang menekankan pembangunan berbasis maritim melalui konsep “Poros Maritim Dunia”. Dalam konsep ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan maritim global, mengingat letak geografis negara yang strategis di antara dua samudra dan dua benua.



Sumber: Situs Web Resmi Maritim.go.id

Gambar 2.1 Logo Kemenko Marves.

Pada awal pembentukannya, Kemenko Marves bertugas mengoordinasikan kementerian-kementerian yang menangani bidang maritim, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Seiring waktu, fungsi Kemenko Marves diperluas untuk mencakup sektor investasi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi dalam

mengoordinasikan kebijakan investasi yang erat kaitannya dengan pengembangan infrastruktur, energi, dan sumber daya alam.

Di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, yang ditunjuk sebagai Menteri Koordinator sejak 2019, Kemenko Marves terus mendorong program-program strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, serta menarik investasi asing dan domestik guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian ini juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan proyek-proyek besar seperti pembangunan tol laut, pengembangan pariwisata maritim, dan percepatan investasi di sektor energi terbarukan.

Kemenko Marves kini berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang bertugas mengintegrasikan kebijakan antar kementerian dalam bidang kemaritiman, lingkungan, energi, serta investasi, dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing di tingkat global.

2.1.1 Visi Misi

2.1.1.1 Visi

Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

2.1.1.2 Misi

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, serta berdaya saing.
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

publik Indonesia adalah seperti berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kemenko Marves.

Struktur organisasi Kemenko Marves tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memiliki tanggung jawab dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pada bidang kemaritiman dan investasi. Di bawah Menko Marves, terdapat Sekretaris Kementerian Koordinator. Kemenko Marves juga mempunyai 6 Deputi yang memiliki tugas di sub-bidang masing-masing, yaitu:

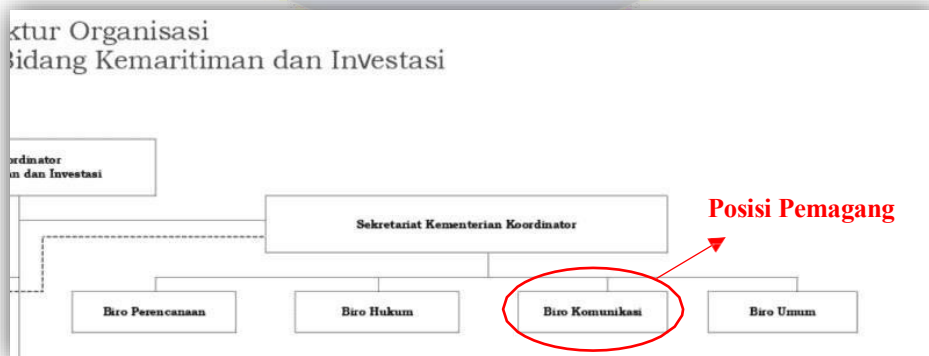
- 1) Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Deputi 1) yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kedaulatan maritim dan energi.
- 2) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi 2) yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya maritim.
- 3) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi (Deputi 3) yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan transportasi.
- 4) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan (Deputi 4) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
- 5) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Deputi 5) yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

- 6) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan (Deputi 6) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Terdapat pula beberapa Biro yang merupakan bagian dari Sekretariat Kementerian Koordinator, yaitu:

- Biro Perencanaan
- Biro Hukum
- Biro Komunikasi
- Biro Umum

Pemegang melakukan kerja magang di bawah Biro Komunikasi yang dipimpin oleh kepala biro. Pada Biro Komunikasi, pemegang ditempatkan di Divisi Humas yang dipimpin oleh Pranata Humas Ahli Muda, Yanelis Prasenja.



Sumber: Situs Web Resmi Maritim.go.id

Gambar 2.3 Posisi Pemegang Melakukan Kerja Magang.

Tugas divisi Humas Kemenko Marves mencakup berbagai fungsi strategis dalam mendukung komunikasi serta citra institusi, yaitu:

Tugas divisi Humas Kemenko Marves mencakup berbagai fungsi strategis dalam mendukung komunikasi serta citra institusi, yaitu:

1. Menyusun dan mengelola strategi komunikasi publik untuk memastikan penyampaian informasi yang efektif.
2. Menyampaikan informasi kebijakan serta program Kemenko Marves kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi.
3. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan media guna memastikan pemberitaan yang akurat dan positif.
4. Mengelola publikasi melalui berbagai platform seperti *website*, media sosial, dan publikasi cetak atau digital.
5. Menangani krisis komunikasi dengan strategi respons yang cepat dan tepat.
6. Mengoordinasikan kegiatan kehumasan dengan instansi terkait untuk memastikan keselarasan informasi.
7. Mengelola citra dan reputasi institusi melalui komunikasi yang transparan, akurat, dan efektif.

